



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2018**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
MALANG NOMOR: 188.45/720/35.07.013/2016  
TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Oleh karenanya, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai salah satu Perangkat Daerah harus menyelaraskan Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Ketentuan setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis tercantum dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Strategis dimaksud memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, Ketentuan lain mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan pedoman teknis yang wajib diacu oleh seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya rangkaian perubahan-perubahan tersebut berimplikasi adanya perubahan susunan dan kewenangan Pemerintahan Daerah, yang meliputi pemerintahan daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Perubahan kewenangan termasuk pada pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dimana Pemerintah Daerah berwenang pada pemenuhan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan. Sementara pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan kerjasama merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Sesuai dengan kondisi serta ketentuan-ketentuan yang ada, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Malang perlu menyusun perubahan dan menetapkan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rancangan Renstra Dinas Pendidikan ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan sisa target waktu 3 (tiga) tahun kedepan (2019-2021) yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 didasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/720/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 adalah sebagai penyesuaian program kegiatan serta target kinerja terhadap indikator yang baru sesuai dengan kewenangan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Selain hal tersebut juga bertujuan sebagai landasan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan penganggarannya, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada sisa target waktu.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan. Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan *stakeholders* Dinas Pendidikan dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan.

Penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pendidikan ini diawali dengan inventarisasi rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan keselarasannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta pengumpulan data-data yang berkaitan. Perumusan indikator kinerja di tingkat sasaran dilakukan dengan pengumpulan data dasar capaian kinerja, pengelohan dan analisis data, serta memperhatikan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Legalisasi Rancangan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

- BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
  - 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan
- BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan
- BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- 6.1 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, menetapkan bahwa tugas pokok Perangkat Daerah (PD) Dinas Pendidikan adalah:

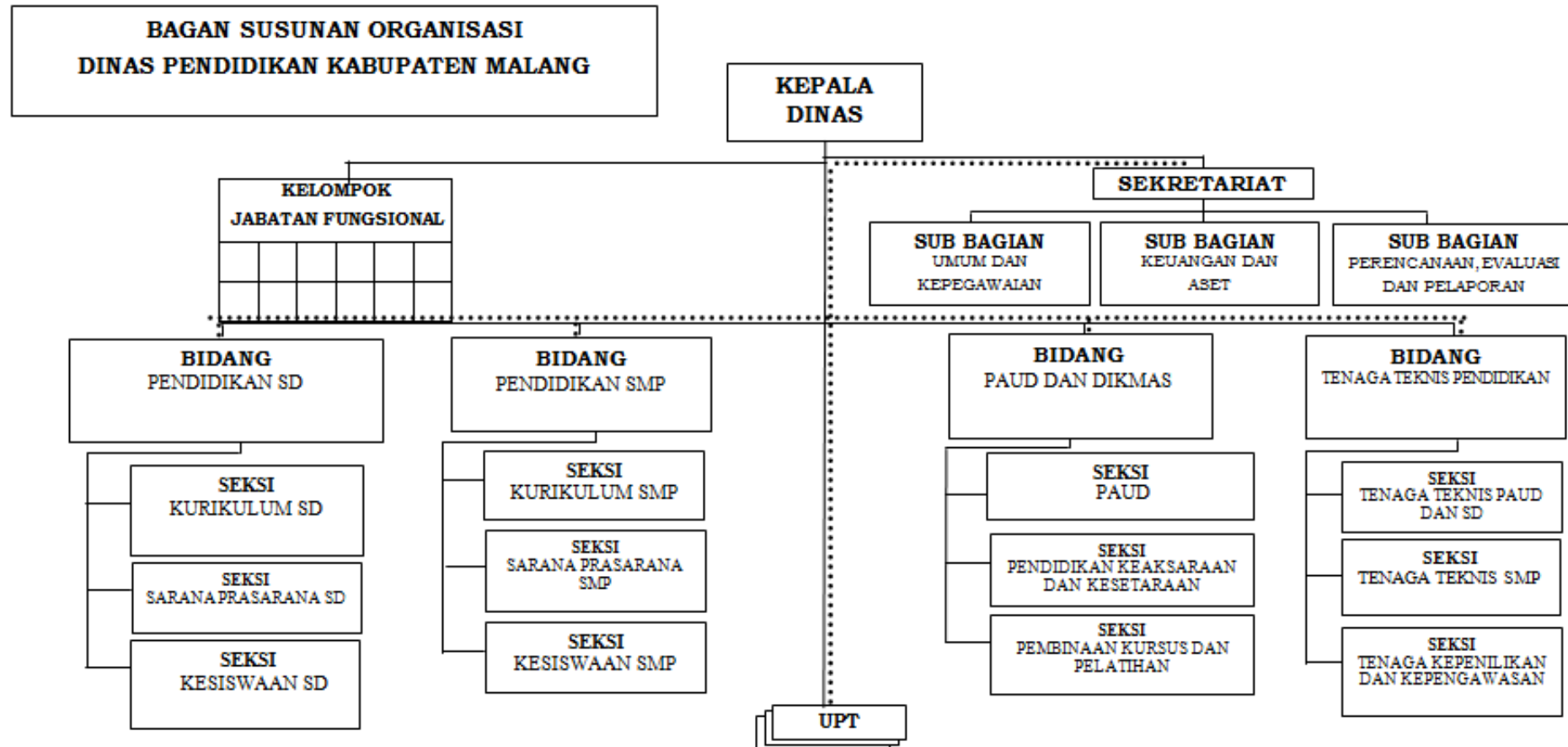
1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program dan kegiatan bidang Pendidikan;
2. Penyusunan Rencana strategis pada Dinas Pendidikan;
3. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan;
7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan;
8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan;
9. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
10. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
11. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
12. Pengaturan dan pengawasan penuelenggaraan pendidikan, ketatalaksanaan, keuangan serta pembangunan sarana prasarannya.



Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:



**Keterangan :**

- : garis komando  
 ..... : garis koordinasi

## 2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

### 2.2.1. Kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai struktural maupun fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, baik pada Kantor Dinas, Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan, lembaga sekolah terinci sebagai berikut:

- Pegawai pada Kantor Dinas = 63 orang
- Pegawai pada Korwil dan sekolah = 318 orang

### 2.2.2. Pejabat Struktural dan Fungsional

Pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang baik yang berada di Kantor Dinas, UPT Kecamatan maupun lembaga sekolah meliputi:

NO.	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	I Ib	1	Kepala Dinas
2	IIIa	1	Sekretaris
3	IIIb	4	Kepala Bidang
4	IVa	15	Kasubbag, Kasi

Sedangkan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang meliputi para Pengawas Sekolah, Guru dan Pamong Belajar pada SKB yang jumlahnya sebagai berikut:

- Pengawas Sekolah = 149 orang
- Guru PNS TK = 246 orang
- Guru PNS SD = 5.733 orang
- Guru PNS SMP = 1.877 orang
- Pamong Belajar SKB = 14 orang

### 2.2.3. Sarana dan Peralatan Kerja Utama

Sarana dan peralatan kerja utama dalam mendukung pelaksanaan dan kelancaran kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang meliputi:

- a. Gedung Kantor 1 unit yang terdiri dari:
  - 1 (satu) ruang Kepala Dinas
  - 1 (satu) ruang Sekretaris
  - 3 (tiga) ruang Sub Bagian
  - 4 (empat) ruang Bidang

- 1 (satu) ruang rapat terbatas
  - 1 (satu) ruang aula rapat
  - 1 (satu) ruang Pengawas
  - 1 (satu) ruang IT
  - 1 (satu) gudang
  - 1 (satu) ruang pertemuan terbuka (pendopo)
- b. Komputer sebanyak 21 unit
- c. Mesin ketik sebanyak 2 unit
- d. Meubelair kantor yang terdiri meja dan kursi kantor, meja dan kursi rapat, sofa tamu dan lain-lain.

Sarana dan peralatan kerja utama tersebut belum termasuk pada kantor korwil di masing-masing kecamatan dan lembaga sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP Negeri.

#### 2.2.4. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2013-2017 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang sebagai berikut;

TABEL

Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan lima tahun terakhir (2013-2017)

NO	TAHUN	APBD KAB		APBD PROV	APBN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL)	BELANJA LANGSUNG (BL)		
1	2013	645.046.408	12.041.207	1.163.519	58.700.919
2	2014	1.195.963.662	18.288.208	809.905	46.636.798
3	2015	1.246.654.431	27.521.594	470.100	73.897.302
4	2016	1.384.455.725	14.906.402	245.000	27.964.670
5	2017	1.023.032.591	14.335.408	130.000	185.678.600

Anggaran Dinas Pendidikan dalam kurun waktu 2013-2017 selalu ada kenaikan. Kenaikan anggaran di setiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan. Untuk anggaran APBN mengalami kenaikan cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya SE Mendagri 910/106/Sj tanggal 11 Januari 2017, dimana dana BOS dicatat pada APBD dalam hal ini pada DPA SKPD meskipun dana tersebut ditransfer langsung dari RKUD Provinsi ke rekening sekolah negeri penerima dana BOS.

#### 2.2.5. Sarana Penunjang Lainnya

Untuk pelaksanaan fungsi layanan pendidikan, salahsatu medianya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini didukung pelh adanya pusat data pendidikan data pokok pendidikan (DAPODIK) dan Sistem Informasi Pendidikan lainnya. Dinas Pendidikan juga dilengkapi dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan dengan unit layanan teknis pendidikan pada kantor Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (Lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang

IP	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDI- KATOR (%)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A</b>	<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>																		
<b>A.1</b>	<b>SD</b>																		
1	% SD yang semua rombelya tidak melebihi 32 siswa	100 %			-	83,46	83,43			-	53,44	58,32			-	64,03	69,90		
2	% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulisi untuk setiap rombel	100 %			-	91,90	91,86			-	48,01	33,47			-	52,24	36,44		
3	% SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap	100 %			-	94,85	94,98			-	80,70	85,19			-	85,08	89,69		
4	% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	100 %			-	77,91	78,23			-	76,60	79,22			-	98,32	101,27		
5	% SD yang memiliki 6 orang guru	100 %			-	94,74	94,98			-	97,40	97,82			-	102,81	102,99		
6	% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	100 %			-	96,53	96,71			-	95,26	97,53			-	98,68	100,85		
7	% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	100 %			-	75,13	71,30			-	80,82	82,49			-	107,57	115,69		
8	% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	100 %			-	74,15	74,48			-	71,69	91,10			-	96,68	122,31		



IP	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR (%)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>B</b>	<b>TARGET IKK</b>																		
<b>B.1</b>	<b>FOKUS KESEJAHTERAAN</b>																		
1	Angka Melek Huruf (AMH)				96	98	98,25			95,25	97,02	98,81			97,22	97,37	97,40		
2	Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)				7,64	7,76	7,85			7,99	8,00	8,04			104,58	103,09	102,42		
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A				113,25	113,23	113,2			113,19	113,17	113,19			100,31	97,18	93,53		
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B				96,5	96,65	98,5			96,41	96,43	96,43			95,41	96,29	95,72		
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C				55,55	58,51	81			55,62	59,34	81,23			102,08	98,56	100,88		
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A				109,00	108,35	108,15			115,61	108,09	99,02			106,06	99,76	91,56		
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B				83,25	83,32	83,92			88,77	84,74	85,53			106,63	101,70	101,92		
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C				36,50	37,25	37,75			39,76	40,24	48,92			108,93	108,03	129,59		
<b>B.2</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>																		
<b>B.2.1</b>	<b>PENDIDIKAN DASAR</b>																		
1	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun				110,84	110,19	109,99			118,5	108,58	102,61			106,95	98,64	93,36		
2	Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun				89,49	89,54	90,15			90,37	87,70	93,88			100,99	97,95	104,14		
3	Rasio ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12				44,79	44,79	44,79			42,33	41,94	39,86			94,51	93,64	88,99		

IP	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDI- KATOR (%)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	tahun																		
4	Rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun				32,96	33,25	33,67			32,96	30,73	31,04			100,00	92,42	92,19		
5	Rasio Guru SD-MI / Murid				268,85	271,27	272,35			257,31	314,95	380,61			95,71	116,10	139,75		
6	Rasio Guru SMP-MTs / Murid				213,24	209,28	200,65			292,98	268,79	370,54			137,39	128,44	184,67		
7	Rasio rombel/guru SD-MI				1,10	1,09	1,09			1,15	1,14	0,85			104,55	104,59	77,98		
8	Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik				86,08	87,97	89,85			97,23	57,49	57,05			112,95	65,35	63,49		
9	Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik				93,43	94,09	95,09			86,83	68,78	63,98			92,94	73,10	67,28		
10	Angka Putus Sekolah SDMI				0,6	0,5	0,13			0,45	0,13	0,09			101,54	101,60	157,92		
11	Angka Putus Sekolah SMPMTs				0,6	0,5	0,35			0,39	0,36	0,44			99,44	62,50	109,66		
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI				99,07	99,19	99,21			99,42	99,46	99,81			100,35	100,27	100,60		
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs				96,70	96,80	96,90			99,89	98,74	99,99			103,30	102,00	103,19		
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs				92,25	92,50	92,75			92,65	97,91	99,38			100,43	105,85	107,15		
<b>B.2.2</b>	<b>PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>																		
1	Guru yg memenuhi kualifikasi S1 / D-IV				49,80	52,98	55,94			57,71	59,60	68,86			115,88	112,50	123,10		



IP	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR (%)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>B.2.3</b>	<b>PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>																		
1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini				62,27	70,5	85,00			70,02	78,73	80,89			100,12	100,44	102,27		

Indikator pelayanan pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar pada aspek indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar yang kemudian dirubah dengan Permendikbud Nomor 23 tahun 2013, Pengukuran terhadap capaian IP SPM dilakukan pada tahun 2017, melalui pengisian instrument dan input pada aplikasi pengukuran SPM Dikdas. Pada jenjang SD ada 20 (dua puluh) Indikator Pencapaian (IP), yaitu: (1) % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa, capaiannya 89%; (2) % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, capaiannya 52%; (3) % SD yang memiliki ruang guru lengkap dengan meja + kursi untuk setiap orang, capaiannya 27%; (4) % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik capaiannya 94%; (5) % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4, capaiannya 99%; (6) % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, capaiannya 96%; (7) % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, capaiannya 93%; (8) % SD yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama  $\geq 3$  jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan, capaiannya 6%; (9) % set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah, capaiannya 55%; (10) % SD yang telah memenuhi rasio buku teks 1 : 1, capaiannya 8%; (11) % SD yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap, capaiannya 12%; (12) % SD yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi, capaiannya 13%; (13) % SD yang guru tetap rata-rata jam Kerja per minggunya 37,5 jam, capaiannya 51%; (14) % SD yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI, capaiannya 63%; (15) % SD yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, capaiannya 100%; (16) % SD yang gurunya menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya, capaiannya 75%; (17) % SD yang gurunya mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, capaiannya 83%; (18) % SD yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester, capaiannya 71%; (19) % SD yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester, capaiannya 100%; (20) Jumlah SD atau MI yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada

Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester, capaiannya 48%

Pada jenjang SMP, ada 20 (dua puluh) IP SPM, yaitu: (1) % SMP yang semua rombелnya tidak melebihi 36 siswa, capaiannya 84%; (2) % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel, capaiannya 58%; (3) % SMP yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik, capaiannya 17%; (4) % SMP yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik, capaiannya 2%; (5) % SMP yang memiliki ruang guru lengkap dengan meja + kursi untuk setiap orang, capaiannya 30%; (6) % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi, capaiannya 66%; (7) % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran], capaiannya 16%; (8) % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4  $\geq 70\%$ , capaiannya 89%; (9) % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik  $\geq 35\%$ , capaiannya 69%; (10) % SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn, capaiannya 23%; (11) % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik, capaiannya 72%; (12) % SMP yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama  $\geq 3$  jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan, capaiannya 16%; (13) % SMP yang telah memenuhi rasio buku teks 1 : 1, capaiannya 9%; (14) % SMP yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi, capaiannya 32%; (15) % SMP yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu, capaiannya 59%; (16) % SMP yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, capaiannya 100%; (17) % SMP yang gurunya menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya, capaiannya 79%; (18) % SMP yang gurunya mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, capaiannya 85%; (19) % SMP yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester, capaiannya 75%; (20) % SMP yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester, capaiannya 100%.

Pemenuhan IP SPM Dikdas dengan pengukuran tingkat kabupaten meliputi 13 (tiga belas) sub indikator, yaitu : (1) % Pengawas sekolah/madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik, capaiannya 100%; (2) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, capaiannya 100%; (3) % set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah, capaiannya 55%; (4) % set buku teks mata pelajaran di SMP yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah, capaiannya 61%; (5) % Guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu 37.5 jam, capaiannya 76%; (6) % rombongan belajar yang memenuhi standar, capaiannya 84%; (7) % guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya, capaiannya 95%; (8) % guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik, capaiannya 96%; (9) % guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester, capaiannya 100%; (10) % satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik, capaiannya 32%; (11) % satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan, capaiannya 100%; (12) % satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan, capaiannya 52%; (13) % satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik, capaiannya 47%

Dari penjabaran capaian SPM di atas, dapat kita lihat bahwa dari 53 (lima puluh tiga) indikator dan sub indikator banyak yang realisasinya tidak mencapai target, hal ini disebabkan antara lain: indikator tersebut relatif masih baru dan sebelumnya belum dilakukan telaahan; terlalu tingginya penetapan angka-angka dalam target indikator-indikator tersebut. Untuk indikator yang realisasinya melebihi target, terdapat pada indikator yang berkaitan dengan guru, hal ini kemungkinan disebabkan adanya kebijakan pemerintah yaitu pemberian tunjangan sertifikasi terhadap guru yang secara langsung maupun tidak langsung guru berupaya untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Untuk indikator kinerja utama (IKU) terdaat dua indicator yakni Indeks Pendidikan dan Cakupan Capaian SPM Dikdas untuk SD dan SMP di

Kabupaten Malang. Capaian Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh variable Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah. Berikut data capaian data-data tersebut lima tahun kebelakang:

TABEL  
DATA CAPAIAN INDEKS PENDIDIKAN TAHUN 2013 S.D 2017

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Harapan Lama Sekolah	11,02	11,25	11,98	12,28	12,56
Indeks HLS	0,612222	0,625	0,665556	0,682222	0,697778
Rata2 Lama Sekolah	6,59	6,66	6,73	6,98	7,17
Indeks RLS	0,439333	0,444	0,448667	0,465333	0,478
<b>Indeks Pendidikan</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,56</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>
Tren	0,01	0,01	0,02	0,0167	

Dari data tersebut terlihat tren kenaikan capaian Indikator Pendidikan sangat tipis, sehingga penetapan target pada tahun 2018-2021 sebagaimana pada tabel 2.2 diatas.

Kemudian untuk indikator Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD, SMP di Kabupaten Malang ditargetkan capaian indikator SPM Dikdas SD dan SMP yang memenuhi diatas 80% adalah ditargetkan bis atuntas pada akhir target renstra pendidikan yakni pada tahun 2021 telah tercapai 27 Indikator pemenuhan SPM Dikdas SD dan SMP di KABUPATEN Malang.

Dengan peningkatan Indeks Pendidikan dan tercapainya Indikator SPM Dikdas SD dan SMP, maka diharapkan pemerataan kualitas dan akses layanan pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan SD, pendidikan SMP, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkungan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

##### 1. Lingkungan Internal

###### KEKUATAN/*STRENGTHS* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD dan DIKMAS yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan sudah diatas rata-rata capaian nasional dan provinsi;
- d. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat 3 tahun terakhir menunjukkan angka 100%;
- e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 99,8% dapat dikategorikan sudah tuntas;
- f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD maupun Dikdas.

###### KELEMAHAN/*WEAKNESSES* (W)

- a. Kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD, SD, SMP belum sesuai Standar Nasional Pendidikan;

- b. Masih belum tercukupinya kebutuhan Guru PNS untuk jenjang SD Negeri, baik Guru Kelas maupun Guru Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan;
- c. Belum tersedianya tenaga khusus administrasi pada Satuan Pendidikan Negeri, sehingga mengalami kesulitan dalam pengelolaan administrasi sekolah serta pengelolaan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada jenjang SD dan SMP Belum optimal;
- e. Tingkat kualitas lulusan pendidikan belum optimal;
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal;
- h. Penempatan tenaga pendidik (guru) belum dilakukan secara merata, masih terdapat kesenjangan baik dari sisi jumlah maupun kualitas antara kawasan pedesaan dan perkotaan;
- i. Belum tertampungnya siswa penyandang disabilitas di lembaga pendidikan luar biasa dan sedikitnya jumlah sekolah inklusif.

## 2. Lingkungan Eksternal

### PELUANG/*OPPORTUNITIES* (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi pemerataan kualitas dan akses layanan pendidikan;
- d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);

- e. Kepedulian masyarakat dalam DUDI terhadap pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- f. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- g. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun PAUD dalam bentuk BOP PAUD;
- h. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### ANCAMAN/ *THREATS* (T)

- a. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- b. Angka kemiskinan masih relatif tinggi;
- c. Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;
- d. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen, sehingga tingkat koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten dirasakan semakin berkurang.

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O (*Strength – Opportunities*)
  - a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
  - c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
  - d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
  - e. Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;



- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
  - g. Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sektor pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.
2. STRATEGI W-O ( *Weaknesses – Opportunities* )
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - e. Meningkatkan pengembangan program keahlian sesuai dengan tuntutan DUDI baik secara kualitas maupun kuantitas.
3. STRATEGI S-T ( *Strengths – Threats* )
- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;
  - e. Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
  - g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.
4. STRATEGI W-T ( *Weaknesses – Threats* )
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;

Meningkatkan peran pengusaha dan *stakeholder* pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan, hal ini didukung oleh adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD;
- b. Tingkat pemerataan kualitas dan perluasan akses layanan pendidikan dasar adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah capaian indikator pemenuhan SPM Dikdas, pada tahun 2017 sesuai hasil sensus SPM Dikdas ketrecaapaian pemenuhan SPM baru pada 11 indikator, sehingga diperlukan langkah konkrit untuk pemenuhan pencapaian SPM Dikdas untuk 16 indikator lainnya. Pengukuran pemerataan kualitas dan akses layanan pendidikan dasar juga dapat dilihat dari capaian kinerja dalam Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) sampai tahun 2017 capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana Prasarana baik jenjang SD maupun SMP, masih menunjukkan nilai yang rendah terhadap nilai menuju SNP (sumber: [pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id));
- c. Peningkatan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari indikator angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS). Capaian AMH pada tahun 2017 99,8% dapat dianggap tuntas untuk pemberantasan buta aksara. Indikator lainnya adalah Rata-rata

Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), dua indikator tersebut pada tahun 2017 masing-masing adalah 7,17 tahun dan 12,56 tahun. Angka ini berpengaruh pada Indeks RLS dan Indeks HLS yang menjadi komponen utama penghitungan Indeks Pendidikan.

- d. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat kita lihat dari capaian indikator guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1/D4 pada tahun 2017 adalah 92,1%. Capaian indikator tersebut tidak secara khusus ditunjang dengan kegiatan untuk meningkatkan kualifikasi akademik PTK, hal ini dimungkinkan pada kebutuhan dan tuntutan bagi PTK untuk meningkatkan kualifikasi akademiknya yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi PTK profesional. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah, dari PTK yang sudah S1/D4, masih terdapat lulusan yang belum sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah "Terwujudnya Kabupaten Malang yang **MADEP MANTEB MANETEP**", adapun misinya adalah

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;

5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Adapun yang mempunyai keterkaitan langsung dengan bidang pendidikan adalah Misi 3 yang mempunyai 1 tujuan 1 sasaran yaitu meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, daya beli serta pemerataan pendapatan.

Adapun prioritas pembangunan pemerintah daerah pada sektor pendidikan antara lain adalah: Peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten dengan difokuskan pada beberapa aspek, antara lain yaitu: (a) peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; (b) pemerataan kualitas dan peningkatan akses layanan pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP.

### 3.3. Telaahan Renstra Kemendikbud dan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur

Tema pembangunan pendidikan didaerah tentunya mengacu kepada visi dan misi Bupati terpilih yang selanjutnya tertuang didalam rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Namun demikian tema pembangunan pendidikan tetap harus mengacu kepada tema pendidikan yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005—2025.

Tahun 2016–2021 memasuki periode ketiga dan keempat, periode ketiga 2015-2019 fokus pembangunan pendidikan menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional dan periode keempat 2020-2024 menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing internasional.

Permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 yang masih relevan dengan kondisi di Kabupaten Malang antara lain :

### 1. Peran *stakeholder* Pelaku Pembangunan Pendidikan belum Optimal

Meskipun ada peningkatan peran serta para pelaku pendidikan yang cukup signifikan, namun pada masing-masing jenjang pendidikan keterlibatannya belum optimal. Jenjang pendidikan dasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi dan penyediaan sarana pribadi siswa saja. Sementara peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan secara umum mendapat stigma negatif dengan adanya jargon “pendidikan gratis”. Padahal komponen biaya pendidikan sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Demikian halnya dengan pemerintah desa perannya belum optimal padahal undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, prioritas penggunaan dana desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan dasar didalamnya adalah bidang pendidikan.

Jenjang pendidikan jenjang menengah, para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran; peran dunia usaha masih kurang dilibatkan padahal pereka adalah pelaku dan sekaligus pengguna dari hasil pendidikan khususnya pendidikan kejuruan. Selain itu, penguatan peran pelaku pada keseluruhan jenjang pendidikan juga masih kurang disinergikan sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

### 2. Belum Optimalnya Akses Layanan PAUD dan DIKMAS yang Berkualitas

Anak usia PAUD merupakan investasi bagi tumbuh kembang anak pada masa yang akan datang. Dari data APK 2017 sebesar 98,8% menunjukkan akses layanan PAUD sudah hampir tuntas, akan tetapi kualitas penyelenggaraan PAUD masih harus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan akses, antara lain dengan Standarisasi layanan PAUD. Sampai dengan saat ini belum ada payung hukum Standar Pelayanan Minimal PAUD. Meskipun sudah ada peraturan menteri yang mengatur tentang PAUD formal yakni jenjang TK.

Lembaga Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) sebagai lembaga non formal, pada saat ini juga belum ada standarisasi layanan DIKMAS, sehingga perlu terus diupayakan langkah-langkah penguatan tata kelola lembaga non formal agar supaya layanan terhadap masyarakat dapat menunjukkan kualitas yang setara dengan pendidikan formal.

### 3. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal

- a. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal

Capaian mutu pendidikan Indonesia yang masih jauh di bawah capaian Negara maju atau bahkan di bawah negara-negara tetangga Indonesia menjadi catatan dalam pembenahan mutu pendidikan di Indonesia.

- b. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Sedangkan Renstra Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah memasuki periode terakhir masa pemerintahan Gubernur Sukarwo, namun demikian isu utama pendidikan yang masih relevan dengan Kabupaten Malang antara lain :

- a. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
- b. Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- c. Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- d. Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- e. Rendahnya mutu lulusan;
- f. Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- g. Implementasi kurikulum 2013;
- h. Implementasi pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun lembaga non formal.

Sejalan dengan tema pembangunan pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan serta renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Bupati terpilih telah mengakomodasi tema pembangunan pendidikan dan isu pendidikan didalam rencana jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang diwujudkan kedalam Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Selanjutnya untuk memperjelas pelaksanaan misi 3, dirumuskan 1 tujuan pokok yang ingin dicapai, yakni Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator tujuan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dari misi 3 dan tujuan misi tersebut ditetapkan 3 sasaran yakni:

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam rangka pemenuhan sasaran pertama meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan dirumuskan strategi dan arah kebijakan serta program sebagai berikut:

- 1) Strategi : Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten;
- 2) Arah Kebijakan : Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal pendidikan Daerah kabupaten;
- 3) Program pembangunan meliputi:
  - a. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
  - b. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
  - d. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  - e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Kabupaten Malang sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang tahun adalah "terwujudnya penataan ruang yang produktif seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien serta mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat".

Berdasarkan RT/RW tersebut di atas, rencana struktur ruang Kabupaten Malang meliputi rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana, hal ini dapat terlihat dari (a) kebijakan dan strategi sistem perdesaan; (b) kebijakan dan strategi sistem perkotaan; (c) kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan ; (d) kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

RT/RW Kabupaten Malang jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang harus selaras dengan asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat serta antisipatif terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di masa yang akan datang;

lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu Pembangunan infrastruktur dalam bidang pendidikan juga harus mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis untuk tetap dapat menjaga kelestarian sumber daya alam demi mewujudkan peningkatan sumber daya manusia yang handal.



### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah:

- 1) Telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- 2) Telaahan focus pembangunan pendidikan periode ketiga tahun ketiga 2015-2019 dan periode keempat 2020-2024 serta rencana strategis pendidikan Dinas pendidikan Provinsi Jawa Timur ;
- 3) Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:
  - a) Masih rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS);
  - b) Penyebaran saran pendidikan yang belum merata;
  - c) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
  - d) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
  - e) Rendahnya mutu lulusan;
  - f) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
  - g) Implementasi kurikulum 2013.
  - h) Implementasi pendidikan karakter baik di lembaga formal maupun lembaga non formal.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan;
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
4. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 9 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malang, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, serta hasil telaahan terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut *goal* atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang periode tahun 2016-2021 adalah: **Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan**, dengan implementasi tujuan sebagai berikut:

1. Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)
2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
3. Meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP;
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen organisasi kependidikan;

Sasaran Dinas Pendidikan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur keberhasilan/ketidak berhasilan suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarannya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran-sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di Dinas Pendidikan untuk menentukan sasaran sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran-sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada RPJMD periode 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas;
2. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas;
3. Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas;
4. Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas;
5. Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
6. Tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik dinas pendidikan.

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
baru													
1	Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan				-	-	0,59	0,6	0,61
						Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1. Indeks Pendidikan	(IHLS + IRLS)/2	-	-	0,59	0,6	0,61
							2. Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD,	Jumlah Indikator SPM Dikdas yang	-	-	18 Indikator	18 Indikator	18 Indikator

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							SMP di Kabupaten Malang	mencapai >80%					
lama													
1				Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);	APK PAUD, ALS, AMH				81,95	82,55	83,35	84,25	85
						Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$(\sum \text{siswa pada jenjang PAUD} / \sum \text{Penduduk Usia 4 - 6 Tahun}) \times 100\%$	81,95	82,55	83,35	84,25	85
						Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	$(\text{RLS} - \text{RLSmin}) / (\text{RLSmax} - \text{RLSmin})$	6,68	6,70	6,73	6,76	6,80

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas	Angka Melek Huruf (AMH)	(Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis / Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas) X 100%	99,1	99,2	99,3	99,4	99,5
2				Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;	APK, APM DIKDAS				99,45	99,55	99,63	99,69	99,75

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas	1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD-MI-Paket A	$\frac{\sum \text{siswa usia 7 - 12 Tahun pada jenjang SD}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	99,45	99,55	99,63	99,69	99,75
							2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP-MTs-Paket B	$\frac{\sum \text{siswa usia 13 - 15 Tahun pada jenjang SMP}}{\sum \text{Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	81,2	81,9	82,6	83,9	84,79
							3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A	$\frac{\sum \text{siswa pada jenjang SD}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	113,20	113,21	113,22	113,23	113,24
							4. Angka Partisipasi Kasar	$\frac{\sum \text{siswa pada jenjang}}{\sum \text{Penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$	96,62	96,69	96,76	96,83	96,85



NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
							(APK) SMP-MTs-Paket B	$\frac{\text{SMP}}{\sum \text{Penduduk Usia 13- 15 Tahun}} \times 100\%$					
							5. Persentase Ruang Kelas SD Kondisi Baik	$\frac{(\sum \text{Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SD})}{\sum \text{Ruang Kelas Jenjang SD}} \times 100\%$	90	91,5	93	94,2	95
							6. Persentase Ruang Kelas SMP Kondisi Baik	$\frac{(\sum \text{Ruang Kelas Kondisi Baik Jenjang SMP})}{\sum \text{Ruang Kelas Jenjang SMP}} \times 100\%$	88,5	92	93,5	95	96
							7. Angka Putus Sekolah (DO) SD	$(\sum \text{Siswa yang Putus Sekolah Jenjang SD})$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,50

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								$\frac{\sum \text{Siswa Sekolah Jenjang SD}}{\sum \text{Siswa Sekolah Jenjang SD}} \times 100\%$					
							8. Angka Putus Sekolah (DO) SMP	$\frac{\sum \text{Siswa yang Putus Sekolah Jenjang SMP}}{\sum \text{Siswa Sekolah Jenjang SMP}} \times 100\%$	0,065	0,06	0,55	0,05	0,04
							9. Angka Lulusan (AL) SD	$\frac{\sum \text{siswa yang lulus Jenjang SD}}{\sum \text{peserta ujian Sekolah Jenjang SD}} \times 100\%$	100	100	100	100,00	100
							10. Angka Lulusan (AL) SMP	$\frac{\sum \text{siswa yang lulus Jenjang SMP}}{\sum \text{peserta ujian Sekolah}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00	100,00	100

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								Jenjang SMP) X 100%					
							11. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke jenjang SM	$\frac{(\sum \text{Siswa Baru Kelas 1 Jenjang SM})}{\sum \text{Siswa yang Lulus UN Tahun pelajaran sebelumnya jenjang SMP})} \times 100\%$	95,5	96,5	97,5	98,5	99,5
3				Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) kependidikan	Persentase Kompetensi dan Kualifikasi Guru				91,6	91,9	92,4	92,7	93
						Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka	1. Persentase guru SD berkelayakan atau telah berkuali	$\frac{(\sum \text{Guru yang telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SD})}{\sum \text{Seluruh Guru}}$	91,6	91,9	92,4	92,7	93

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						memenuhi standar nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	fikasi S1/D4	Jenjang SD X 100%					
							2. Persentase guru SMP berkeelay akan atau telah berkualifikasi S1/D4	$\frac{\sum \text{Guru yang telah berkualifikasi S1/D4 Jenjang SMP}}{\sum \text{Seluruh Guru Jenjang SMP}} \times 100\%$	92,65	92,7	92,75	92,8	92,85
							3. Persentase guru SD tersertifikasi	$\frac{\sum \text{Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SD}}{\sum \text{Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang}}$	86,1	86,2	86,3	86,4	84

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
								SD) X 100%					
							4. Persentase guru SMP tersertifikasi	$(\sum \text{Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersertifikasi Jenjang SMP} / \sum \text{Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMP}) \times 100\%$	89,5	91	92,5	93,5	94
							5. Rasio Guru SD terhadap Siswa	$\sum \text{Siswa SD} : \sum \text{Guru SD}$	1:16	1:16	1:16	1:16	1:20
							6. Rasio Guru SMP terhadap Siswa SMP	$\sum \text{Siswa SMP} : \sum \text{Guru SMP}$	1:18	1:18	1:18	1:18	1:20
							7. Rasio Rombel/ Guru	$\sum \text{Rombel} : \sum \text{Guru}$	0,91	0,94	0,97	1,00	1,00
4				Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan	Cakupan Sekolah Menerapkan MBS				88	90	92	94	96

NO	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR TUJUAN DINAS PENDIDIKAN	SASARAN DINAS PENDIDIKAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PENDIDIKAN	Formula /Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP									
						Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	$(\sum \text{Jumlah Sekolah Menerapkan MBS} / \sum \text{Jumlah Sekolah}) \times 100\%$	88	90	92	94	96

#### 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di atas, upaya yang dilakukan menggunakan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- Sasaran pertama: “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, dicapai melalui strategi “Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD, baik formal maupun nonformal. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD, (2) penyediaan subsidi beasiswa peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD, (3) Akreditasi lembaga PAUD.
- Sasaran kedua, “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan dasar” dicapai melalui 5 (lima) strategi, yaitu sebagai berikut: (1) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar; (2) Fasilitasi penyelenggaran KBM pendidikan dasar yang berkualitas; (3) Peningkatan kapasitas pendidik; (4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan dan (5) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan.
- Sasaran ketiga: “Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan kesetaraan”, dicapai melalui strategi fasilitasi penyelenggaraan kesetaraan melalui Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik lembaga kestaraan/DIKMAS. Arah kebijakan strategi tersebut adalah (1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga kesetaraan/DIKMAS, (2) peningkatan kualifikasi akademik serta kompetnsi pendidik lembaga Kesetaraan/DIKMAS, (3) Akreditasi lembaga kesetaraan/DIKMAS.

Arah kebijakan dari masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Penyediaan sarana prasarana pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kestaraan dalam rangka memenuhi SPM;

Strategi 2 : Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa;

Strategi 3 : Peningkatan jumlah dan kualifikasi akademik serta kompetensi tenaga PTK/pamong belajar;

Strategi 4 : Penerapan metodologi pembelajaran berbasis TIK;

Strategi 5 : Penerapan SIM Pendidikan dalam manajemen pendidikan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Strategi 6 : Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik bidang Pendidikan



Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
BARU							
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;	Meningkatkan Kualitas dan Akses Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Rekrutmen guru, fasilitasi peningkatan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi PTK	Pemberian beasiswa bagi guru yang melanjutkan ke jenjang S1 dan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi dan peningkatan profesionalitas PTK	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan
2					Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD dan DIKMAS, baik formal maupun nonformal	1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS 2) penyediaan subsidi beasiswa peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD dan DIKMAS 3) Akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
3					1) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar;	1) Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM;	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
4					2) Fasilitasi		Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					penyelenggaraan KBM pendidikan dasar yang berkualitas; 3) Peningkatan kapasitas pendidik; 4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan dan 5) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	2) Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa; 3) Peningkatan jumlah dan kualifikasi akademik pendidikan; 4) Penerapan metodologi pembelajaran berbasis TIK; 5) Penerapan SIM Pendidikan dalam manajemen pendidikan dasar.	
5					1) fasilitasi pelayanan Korwil, SKB dan penyediaan data statistik; 2) Fasilitasi fungsi pelayanan administrasi perkantoran; 3) Pemenuhan sarana prasarana aparatur; 4) Fasilitasi penyusunan rencana	1) penyediaan biaya operasional unit-unit pelaksana teknis; 2) penyediaan anggaran kegiatan yang menunjang layanan administrasi perkantoran; 3) Penyediaan anggaran untuk memenuhi	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					program kegiatan, evaluasi dan pelaporan perkembangan capaian kinerja program kegiatan; 5) Penerapan SIM Pendidikan dalam layanan administrasi pendidikan.	kebutuhan sarana prasarana apratur dalam rangka pelaksanaan tupoksi; 4) Penyediaan anggaran.	
LAMA							
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;	Tersedia dan terjangkau layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS);	Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan PAUD yang berkualitas	Fasilitasi penyelenggaraan PAUD dan DIKMAS dengan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD dan DIKMAS, baik formal maupun nonformal	1) penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana PAUD dan DIKMAS 2) penyediaan subsidi beasiswa peningkatan kualifikasi akademik pendidik PAUD dan DIKMAS 3) Akreditasi lembaga PAUD dan DIKMAS.	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
				Meningkatnya perluasan akses dan pemerataan DIKMAS yang berkualitas			
				Meningkatnya angka literasi penduduk usia 15 tahun ke atas			
2			Terjaminnya kepastian	Meningkatnya perluasan akses	1) pemenuhan kebutuhan	1) Penyediaan sarana	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			memperoleh layanan pendidikan dasar yang merata dan berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;	dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas	<p>sarana dan prasarana pendidikan dasar;</p> <p>2) Fasilitasi penyelenggaraan KBM pendidikan dasar yang berkualitas;</p> <p>3) Peningkatan kapasitas pendidik;</p> <p>4) Penguatan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan kompetensi lulusan dan</p> <p>5) Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan</p>	<p>prasarana pendidikan dasar dalam rangka memenuhi SPM;</p> <p>2) Penyediaan biaya operasional proses KBM dan bantuan pendidikan bagi siswa;</p> <p>3) Peningkatan jumlah dan kualifikasi akademik pendidikan;</p> <p>4) Penerapan metodologi pembelajaran berbasis TIK;</p> <p>5) Penerapan SIM Pendidikan dalam manajemen pendidikan dasar.</p>	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3			Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) kependidikan	Terpenuhinya jumlah, kualifikasi, dan kompetensi guru sesuai SPM dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah	Rekrutmen guru, fasilitasi peningkatan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi PTK	Pemberian beasiswa bagi guru yang melanjutkan ke jenjang S1 dan peningkatan kompetensi melalui sertifikasi profesionalitas PTK	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI PD	KEBIJAKAN PD	PROGRAM PRIORITAS PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pertama			
4			Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi administrasi dan manajemen SD dan SMP	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka optimalisasi fungsi layanan publik pada SD dan SMP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) fasilitasi pelayanan Korwil, SKB dan penyediaan data statistik;</li> <li>2) Fasilitasi fungsi pelayanan administrasi perkantoran;</li> <li>3) Pemenuhan sarana prasarana aparatur;</li> <li>4) Fasilitasi penyusunan rencana program kegiatan, evaluasi dan pelaporan perkembangan capaian kinerja program kegiatan;</li> <li>5) Penerapan SIM Pendidikan dalam layanan administrasi pendidikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyediaan biaya operasional unit-unit pelaksana teknis;</li> <li>2) penyediaan anggaran kegiatan yang menunjang layanan administrasi perkantoran;</li> <li>3) Penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana aparatur dalam rangka pelaksanaan tupoksi;</li> <li>4) Penyediaan anggaran.</li> </ol>	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Dinas Pendidikan

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama-bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga yang tentunya ditentukan bagaimana cara seorang manager menyusun sebuah perencanaan tersebut.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga/ masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2016-2021, program dan kegiatan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu Program/Kegiatan Utama dan Program/Kegiatan Penunjang. Program/kegiatan utama adalah sekumpulan rencana kerja yang berdampak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Sedangkan program/kegiatan penunjang adalah sekumpulan rencana kerja yang memberikan dampak secara tidak langsung terhadap capaian indikator sasaran. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2016-2021.

Tabel. 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)		target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan	Indek pendidikan	Sasaran rutin		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.505.425.000		100%	3.334.976.000	100%	3.364.529.000	100%	3.394.081.000	100%	3.394.081.000	100%	10.152.691.000	Dinas Pendidikan	
					1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7374 buah	57.897.000	APBD Kabupaten	7532 buah	60.654.000	7909 buah	63.411.000	8304 buah	66.168.000	8304 buah	66.168.000	24517 buah	195.747.000	Dinas Pendidikan	
					2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	24 Rekening	199.545.000	APBD Kabupaten	24 Rekening	199.545.000	24 Rekening	199.545.000	24 Rekening	199.545.000	24 Rekening	199.545.000	72 Rekening	598.635.000	Dinas Pendidikan	
					3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	15 Orang	200.000.000	APBD Kabupaten	15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	15 Orang	200.000.000	45 Orang	600.000.000	Dinas Pendidikan	
					4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	59 OB	708.000.000	APBD Kabupaten	59 OB	708.000.000	59 OB	708.000.000	59 OB	708.000.000	59 OB	708.000.000	177 OB	2.124.000.000	Dinas Pendidikan	
					5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	0 Unit	200.000.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	Dinas Pendidikan
					6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	59 Jenis	910.413.000	APBD Kabupaten	59 Jenis	925.586.000	59 Jenis	940.760.000	59 Jenis	955.933.000	59 Jenis	955.933.000	177 Jenis	2.852.626.000	Dinas Pendidikan	
					7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	59 Jenis	225.584.000	APBD Kabupaten	59 Jenis	229.343.000	59 Jenis	233.103.000	59 Jenis	236.863.000	59 Jenis	236.863.000	177 Jenis	706.829.000	Dinas Pendidikan	
					8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	131.874.000	APBD Kabupaten	59 Jenis	134.072.000	59 Jenis	136.270.000	59 Jenis	138.468.000	59 Jenis	138.468.000	177 Jenis	413.206.000	Dinas Pendidikan	

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan			Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target		Rp *)
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	59	254.642.000	APBD Kabupaten	59	258.886.000	59	263.130.000	59	267.374.000	59	267.374.000	177	797.878.000	Dinas Pendidikan	
					10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	456 Perjalanan	308.735.000	APBD Kabupaten	478 Perjalanan	309.445.000	490 Perjalanan	310.155.000	512 Perjalanan	310.865.000	512 Perjalanan	310.865.000	1514 Perjalanan	931.885.000	Dinas Pendidikan	
					11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	456 Perjalanan	308.735.000	APBD Kabupaten	478 Perjalanan	309.445.000	490 Perjalanan	310.155.000	512 Perjalanan	310.865.000	512 Perjalanan	310.865.000	1514 Perjalanan	931.885.000	Dinas Pendidikan	
					II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	634.791.000		100%	703.123.000	100%	771.456.000	100%	839.789.000	100%	839.789.000	100%	2.451.034.000	Dinas Pendidikan	
					12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 Gedung	303.126.000	APBD Kabupaten	8 Gedung	346.429.000	9 Gedung	389.733.000	10 Gedung	433.037.000	10 Gedung	433.037.000	29 Gedung	1.255.807.000	Dinas Pendidikan	
					13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 Kendaraan	35.000.000	APBD Kabupaten	3 Kendaraan	40.000.000	3 Kendaraan	45.000.000	3 Kendaraan	50.000.000	3 Kendaraan	50.000.000	3 Kendaraan	145.000.000	Dinas Pendidikan	
					14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Unit	100.290.000	APBD Kabupaten	11 Unit	110.319.000	12 Unit	120.348.000	13 Unit	130.377.000	13 Unit	130.377.000	38 Unit	381.102.000	Dinas Pendidikan	
					15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	34 Lembaga	196.375.000	APBD Kabupaten	34 Lembaga	206.375.000	34 Lembaga	216.375.000	34 Lembaga	226.375.000	34 Lembaga	226.375.000	34 Lembaga	569.125.000	Dinas Pendidikan	
					III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	60.000.000		100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	108.000.000	100%	324.000.000	Dinas Pendidikan	
					16. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten	9 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	0		
					17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0		
					18. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	5 Dokumen	10.000.000	APBD Kabupaten	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0		



No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp *)	
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	19 Dokumen	20.000.000	APBD Kabupaten	19 Dokumen	108.000.000	19 Dokumen	108.000.000	19 Dokumen	108.000.000	19 Dokumen	108.000.000	19 Dokumen	324.000.000	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1. Indeks Pendidikan 2. Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD, SMP di Kabupaten Malang	IV. Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan	Meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	0%	0		91,9 %	2.871.100.000	92,4 %	2.871.100.000	92,7 %	2.871.100.000	93%	2.871.100.000	93%	8.613.300.000	
					20. Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD dan SD	Persentase guru PAUD dan SD yang tersertifikasi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Persentase guru SD kualifikasi S1/D4	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya	0 Orang	0	APBD Kabupaten	400 Orang	100.000.000	400 Orang	100.000.000	400 Orang	100.000.000	400 Orang	100.000.000	400 Orang	300.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah Berprestasi	0 Orang	0	APBD Kabupaten	132 Orang	145.000.000	132 Orang	145.000.000	132 Orang	145.000.000	132 Orang	145.000.000	132 Orang	435.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah	0 Orang	0	APBD Kabupaten	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	300.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(PAUD dan SD)	0 Kecamatan	0	APBD Kabupaten	33 Kecamatan	50.000.000	33 Kecamatan	50.000.000	33 Kecamatan	50.000.000	33 Kecamatan	50.000.000	33 Kecamatan	150.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi	0 Orang	0	APBD Kabupaten	200 Orang	72.000.000	200 Orang	72.000.000	200 Orang	72.000.000	200 Orang	72.000.000	200 Orang	216.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah guru yang terkuifikasi S1	0 Orang	0	APBD Kabupaten	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	150.000.000	40 Orang	450.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Seleksi Calon KS	0 Orang	0	APBD Kabupaten	250 Orang	375.000.000	250 Orang	375.000.000	250 Orang	375.000.000	250 Orang	375.000.000	250 Orang	1.125.000.000	Dinas Pendidikan
						Aplikasi Pengajuan Kenaikan gaji berkala Online	0 Aplikasi	0	APBD Kabupaten	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	300.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Diklat PKB Guru	0 KKG	0	APBD Kabupaten	33 KKG	200.000.000	33 KKG	200.000.000	33 KKG	200.000.000	33 KKG	200.000.000	33 KKG	600.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	44.100.000	1 Dokumen	44.100.000	1 Dokumen	44.100.000	1 Dokumen	44.100.000	1 Dokumen	132.300.000	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab		
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target		Rp *)	
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						(Mapping)															
						Persentase guru PAUD kualifikasi S1/D4	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
					21. Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru SMP	Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya (SMP)	0 Orang	0	APBD Kabupaten	200 Orang	60.000.000	200 Orang	60.000.000	200 Orang	60.000.000	200 Orang	60.000.000	200 Orang	180.000.000	0	Dinas Pendidikan
						Persentase guru SMP yang tersertifikasi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Persentase guru SMP kualifikasi S1/D4	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(SMP)	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	69 Lembaga	30.000.000	69 Lembaga	30.000.000	69 Lembaga	30.000.000	69 Lembaga	30.000.000	69 Lembaga	90.000.000	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah SMP Berprestasi	0 Orang	0	APBD Kabupaten	70 Orang	75.000.000	70 Orang	75.000.000	70 Orang	75.000.000	70 Orang	75.000.000	70 Orang	225.000.000	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Mapping)	0 Dokumen	0	APBD Kabupaten	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	60.000.000	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah SMP	0 Orang	0	APBD Kabupaten	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	150.000.000	0	Dinas Pendidikan
					22. Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas dan Penilik	Persentase pengawas dan Penilik yang tersertifikasi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah peserta Bimtek Pengawas	0 Orang	0	APBD Kabupaten	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	300.000.000	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Bimtek Penilik	0 Orang	0	APBD Kabupaten	42 Orang	60.000.000	42 Orang	60.000.000	42 Orang	60.000.000	42 Orang	60.000.000	42 Orang	180.000.000	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Pengawas dan Penilik	0 Orang	0	APBD Kabupaten	169 Orang	168.000.000	169 Orang	168.000.000	169 Orang	168.000.000	169 Orang	168.000.000	169 Orang	504.000.000	0	Dinas Pendidikan
					23. Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD, SD dan SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Guru PAUD dan SD Penerima Bantuan	0 Orang	0	Bantuan Provinsi	357 Orang	972.000.000	357 Orang	972.000.000	357 Orang	972.000.000	357 Orang	972.000.000	357 Orang	2.916.000.000	0	Dinas Pendidikan
					V. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	0%	0		82.55 %	39.223.600.000	83.35 %	39.248.600.000	84.25 %	39.273.600.000	85%	39.273.600.000	85%	117.795.800.000	0	Dinas Pendidikan
					24. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah pendidik peserta peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang bermutu	0 Orang	0	APBD Kabupaten	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	100.000.000	200 Orang	300.000.000	0	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab		
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target		Rp *)	
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target		Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE LUAR)	0 Set	0	APBD Kabupaten	30 Set	600.000.000	35 Set	625.000.000	40 Set	650.000.000	40 Set	650.000.000	40 Set	1.925.000.000	Dinas Pendidikan	
						Jumlah pendidik PAUD yang menerima insentif	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah peserta yang mengikuti lomba kreatifitas pendidik PAUD	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengelolaan PAUD	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah pendidik dan penilik PAUD yang dibina	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Siswa PAUD yang mengikuti lomba kreativitas anak	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non Fisik (BOP PAUD)	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	1522 Lembaga	35.932.200.000	1522 Lembaga	35.932.200.000	1522 Lembaga	35.932.200.000	1522 Lembaga	35.932.200.000	1522 Lembaga	107.796.600.000	Dinas Pendidikan	
					25. Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal	Lembaga PAUD dan DIKMAS yang ter-akreditasi	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	50 Lembaga	240.000.000	50 Lembaga	240.000.000	50 Lembaga	240.000.000	50 Lembaga	240.000.000	50 Lembaga	720.000.000	Dinas Pendidikan	
						Jumlah lembaga yang mengikuti Expo dan publikasi Pendidikan Non Formal	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KF)	0 WB	0	APBD Kabupaten	200 WB	200.000.000	200 WB	200.000.000	200 WB	200.000.000	200 WB	200.000.000	600 WB	600.000.000	Dinas Pendidikan	
						Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	0 WB	0	APBD Kabupaten	200 WB	120.000.000	200 WB	120.000.000	200 WB	120.000.000	200 WB	120.000.000	200 WB	360.000.000	Dinas Pendidikan	
						Jumlah WB yang mengikuti program Paket A dan terlayani	0 WB	0	APBD Kabupaten	100 WB	100.000.000	100 WB	100.000.000	100 WB	100.000.000	100 WB	100.000.000	100 WB	300.000.000	Dinas Pendidikan	
						Jumlah WB yang mengikuti program Paket B dan terlayani	0 WB	0	APBD Kabupaten	300 WB	840.000.000	300 WB	840.000.000	300 WB	840.000.000	300 WB	840.000.000	300 WB	2.520.000.000	Dinas Pendidikan	
					26. Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Jumlah Peserta Publikasi PNF	0 Orang	0	APBD Kabupaten	400 Orang	400.000.000	400 Orang	400.000.000	400 Orang	400.000.000	400 Orang	400.000.000	400 Orang	1.200.000.000	Dinas Pendidikan	
						Jumlah WB yang mengikuti Pendidikan Kecakapan Hidup	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga Kursus yang terakreditasi	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target		Rp *)
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target		Rp *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Jumlah Penduduk miskin dan Pengangguran Usia Produktif (Usia 15 s.d 40 Tahun) yang mengikuti kegiatan	0 Orang	0	APBD Kabupaten	100 Orang	400.000.000	100 Orang	400.000.000	100 Orang	400.000.000	100 Orang	400.000.000	100 Orang	1.200.000.000	Dinas Pendidikan
					27. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima DAK	0 Lembaga TK Negeri	0	DAK	4 Lembaga TK Negeri	281.400.000	4 Lembaga TK Negeri	281.400.000	4 Lembaga TK Negeri	281.400.000	4 Lembaga TK Negeri	281.400.000	4 Lembaga TK Negeri	844.200.000	Dinas Pendidikan
					28. Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK Provinsi)	0 Orang	0	Bantuan Provinsi	50 Orang	10.000.000	50 Orang	10.000.000	50 Orang	10.000.000	50 Orang	10.000.000	50 Orang	30.000.000	Dinas Pendidikan
					VI. Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	12 Indikator	25.000.000		15 Indikator	23.471.531.348	18 Indikator	24.616.531.348	21 Indikator	24.766.531.348	27 Indikator	24.916.531.348	27 Indikator	74.299.594.044	Dinas Pendidikan
					29. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya selain DAK	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	50 Lembaga	1.030.000.000	100 Lembaga	2.000.000.000	100 Lembaga	2.000.000.000	100 Lembaga	2.000.000.000	100 Lembaga	6.000.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga Penyelenggara Adiwiyata	5 Lembaga	25.000.000	APBD Kabupaten	10 Lembaga	75.000.000	10 Lembaga	75.000.000	20 Lembaga	150.000.000	40 Lembaga	300.000.000	40 Lembaga	525.000.000	Dinas Pendidikan
					30. Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Inklusi	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	0 Lembaga	0	48 Lembaga	175.000.000	48 Lembaga	250.000.000	48 Lembaga	250.000.000	48 Lembaga	675.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga SD yang mengikuti Akreditasi Sekolah	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	80 Lembaga	232.800.000	80 Lembaga	232.800.000	80 Lembaga	232.800.000	80 Lembaga	232.800.000	80 Lembaga	698.400.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan UAS	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	1474 Lembaga	2.257.430.600	1474 Lembaga	2.257.430.600	1474 Lembaga	2.257.430.600	1474 Lembaga	2.257.430.600	1474 Lembaga	6.772.291.800	Dinas Pendidikan
					31. Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan Guru Terpencil	0 Orang	0	APBD Kabupaten	33 Orang	97.200.000	33 Orang	97.200.000	33 Orang	97.200.000	33 Orang	97.200.000	33 Orang	291.600.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lomba Kretivitas siswa SD yang dilaksanakan	0 Lomba	0	APBD Kabupaten	7 Lomba	677.485.000	7 Lomba	677.485.000	7 Lomba	677.485.000	7 Lomba	677.485.000	7 Lomba	2.032.455.000	Dinas Pendidikan
					32. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima	0 Lembaga	0	DAK	81 Lembaga	19.101.615.748	81 Lembaga	19.101.615.748	81 Lembaga	19.101.615.748	81 Lembaga	19.101.615.748	81 Lembaga	57.304.847.244	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target		Rp *)
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target		Rp *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					VII. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang	12 Indikator	300.000.000		15 Indikator	23.484.409.172	18 Indikator	25.033.675.912	21 Indikator	25.133.675.912	27 Indikator	26.457.675.912	27 Indikator	76.625.027.736	Dinas Pendidikan
					33. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya selain DAK	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	320 Lembaga	2.500.000.000	320 Lembaga	2.500.000.000	320 Lembaga	2.500.000.000	320 Lembaga	2.500.000.000	320 Lembaga	7.500.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui DAK	0 Lembaga	0	DAK	96 Lembaga	2.090.000.000	120 Lembaga	2.090.000.000	120 Lembaga	2.090.000.000	120 Lembaga	2.090.000.000	120 Lembaga	6.270.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sekolah rintisan Adiwiyata	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	5 Lembaga	100.000.000	15 Lembaga	300.000.000	15 Lembaga	300.000.000	25 Lembaga	400.000.000	25 Lembaga	1.000.000.000	Dinas Pendidikan
					34. Pengembangan implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional HR GTT/PTT	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	28 Lembaga	2.240.000.000	28 Lembaga	3.240.000.000	28 Lembaga	3.240.000.000	28 Lembaga	4.240.000.000	28 Lembaga	10.720.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga SMP/MTs Penerima Bantuan JAS	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti Akreditasi Sekolah	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	50 Lembaga	50.000.000	100 Lembaga	150.000.000	100 Lembaga	150.000.000	100 Lembaga	150.000.000	100 Lembaga	450.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Lembaga penyelenggara UN SMP	0 Sekolah	0	APBD Kabupaten	323 Sekolah	50.733.260	323 Sekolah	100.000.000	323 Sekolah	100.000.000	323 Sekolah	100.000.000	323 Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan
					35. Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lomba Kreativitas siswa SMP yang dilaksanakan	8 Lomba	300.000.000	APBD Kabupaten	8 Lomba	300.000.000	8 Lomba	400.000.000	8 Lomba	400.000.000	8 Lomba	400.000.000	8 Lomba	1.200.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi O2SN, FLS2N dan lomba lainnya	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target		Rp *)
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target		Rp *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Jumlah Sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru secara online	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	69 Lembaga	293.958.600	69 Lembaga	293.958.600	69 Lembaga	293.958.600	69 Lembaga	293.958.600	69 Lembaga	881.875.800	Dinas Pendidikan
						Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Cerdas Cermat tingkat SMP	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	323 Lembaga	150.000.000	323 Lembaga	150.000.000	323 Lembaga	150.000.000	323 Lembaga	150.000.000	323 Lembaga	450.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Sekolah yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	323 Lembaga	176.000.000	323 Lembaga	276.000.000	323 Lembaga	376.000.000	323 Lembaga	600.000.000	323 Lembaga	1.252.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	323 Lembaga	50.000.000	323 Lembaga	50.000.000	323 Lembaga	50.000.000	323 Lembaga	50.000.000	323 Lembaga	150.000.000	Dinas Pendidikan
						Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba kreativitas siswa	0 Lembaga	0	APBD Kabupaten	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	300.000.000	323 Lembaga	900.000.000	Dinas Pendidikan
					36. Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima	0 Lembaga	0	DAK	106 Lembaga	14.883.717.312	106 Lembaga	14.883.717.312	106 Lembaga	14.883.717.312	106 Lembaga	14.883.717.312	106 Lembaga	44.651.151.936	Dinas Pendidikan
					VIII. Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	0%	0		100%	185.678.600.000	100%	185.678.600.000	100%	185.678.600.000	100%	185.678.600.000	100%	557.035.800.000	Dinas Pendidikan
					37. Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD dan SMP)	0 Lembaga	0	APBD Provinsi	1197 Lembaga	185.678.600.000	1197 Lembaga	185.678.600.000	1197 Lembaga	185.678.600.000	1197 Lembaga	185.678.600.000	1197 Lembaga	557.035.800.000	Dinas Pendidikan
					IX. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	88%	403.258.000		90%	1.600.000.000	92%	1.900.000.000	94%	1.950.000.000	95%	1.950.000.000	95%	5.800.000.000	Dinas Pendidikan
					38. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	75.000.000	APBD Kabupaten	5 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	250.000.000	5 Dokumen	750.000.000	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp *)		
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					39. Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	90.000.000	APBD Kabupaten	6 Kegiatan	300.000.000	6 Kegiatan	350.000.000	6 Kegiatan	350.000.000	6 Kegiatan	350.000.000	6 Kegiatan	1.050.000.000	Dinas Pendidikan	
					40. Pembinaan serta penguatan peran serta masyarakat pendidikan	Jumlah Peserta yang dibina	1600 Peserta	50.000.000	APBD Kabupaten	1600 Peserta	150.000.000	1600 Peserta	250.000.000	1600 Peserta	250.000.000	1600 Peserta	250.000.000	1600 Peserta	750.000.000	Dinas Pendidikan	
					41. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah SIM Pendidikan	5 Aplikasi	138.258.000	APBD Kabupaten	5 Aplikasi	550.000.000	6 Aplikasi	600.000.000	8 Aplikasi	650.000.000	8 Aplikasi	650.000.000	8 Aplikasi	1.900.000.000	Dinas Pendidikan	
					42. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan/Seminar	2 Pelatihan/Seminar	50.000.000	APBD Kabupaten	4 Pelatihan/Seminar	300.000.000	6 Pelatihan/Seminar	350.000.000	6 Pelatihan/Seminar	350.000.000	6 Pelatihan/Seminar	350.000.000	6 Pelatihan/Seminar	1.050.000.000	Dinas Pendidikan	
					43. Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Pelatihan/Seminar	0 Pelatihan/Seminar	0	Bantuan Provinsi	4 Pelatihan/Seminar	100.000.000	6 Pelatihan/Seminar	100.000.000	6 Pelatihan/Seminar	100.000.000	6 Pelatihan/Seminar	100.000.000	6 Pelatihan/Seminar	300.000.000	Dinas Pendidikan	
					X. Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	81.95 %	100.000.000		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Pendidikan	
					44. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan lomba yang dilaksanakan	9 Jenis lomba	100.000.000	APBD Kabupaten	0 Jenis lomba	0	0 Jenis lomba	0	0 Jenis lomba	0	0 Jenis lomba	0	0 Jenis lomba	0	0	Dinas Pendidikan
					XI. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Peningkatan Persentase APK SD/SMP, APM SD/SMP, Ruang Kelas SD/SMP Kondisi baik, Angka Lulus (AL) SD/SMP, Angka Melanjutkan (AM) SD/SMP dan Penurunan Angka Putus Sekolah (APs) SD/SMP	113.19 %	70.916.829.000		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	Dinas Pendidikan	
					45. Pembangunan Gedung Sekolah	Jumlah USB terbangun	2 Unit	2.200.000.000	APBD Kabupaten	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	Dinas Pendidikan	

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp *)		
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					46. Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	Jumlah Kegiatan Lomba Siswa berprestasi yang dilaksanakan	3 Kegiatan	36.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					47. Pembinaan SMP Terbuka	Jumlah Kegiatan Layar Bidik yang dilaksanakan	1 Kegiatan	2.400.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					48. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara SD dan SMP	Jumlah Workshop dan Pelatihan yang dilaksanakan	4 Kegiatan	170.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					49. Penyelenggaraan Paket B setara SMP	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1.000.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					50. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan Pembinaan MBS yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					51. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Lomba yang dilaksanakan	8 Lomba	150.000.000	APBD Kabupaten	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0	Dinas Pendidikan
					52. Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan UKS yang dilaksanakan	1 Kegiatan	25.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					53. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	Jumlah Kegiatan Akreditasi Sekolah dilaksanakan	1 Kegiatan	207.180.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					54. Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD, MI, SMP dan MTs	Jumlah Kegiatan pendukung UAS yang dilaksanakan	1 Kegiatan	658.449.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					55. Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs (DAK)	Jumlah Lembaga penerima dana DAK	250 Lembaga	64.045.200.000	APBD Kabupaten	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	Dinas Pendidikan



No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rentra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab	
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp *)		
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					XII. Program Pendidikan Menengah	Peningkatan Persentase APK SMP/APM SMP,Ruang Kelas SMP,Kondisi baik,Angka Lulus (AL) SMP, Angka Melanjutkan (AM) SMP dan Penurunan Angka Putus Sekolah (APs) SMP	96.55 %	2.590.000.000		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	Dinas Pendidikan
					56. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)	Jumlah Lembaga SMP Negeri Satu Atap penerima dana BOMM	28 Lembaga	2.240.000.000	APBD Kabupaten	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	Dinas Pendidikan
					57. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Lomba yang dilaksanakan	4 Lomba	350.000.000	APBD Kabupaten	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0 Lomba	0	0	Dinas Pendidikan
					58. Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Lembaga SMP yang melaksanakan PPDB online	0	0	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan
					XIII. Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan Persentase Angka Melek Huruf ( AMH )	99.1 %	300.000.000		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	Dinas Pendidikan
					59. Pengembangan Pendidikan Non Formal	Jumlah WB yang mendapatkan pelatihan Pendidikan Keaksaraan	200 Orang	100.000.000	APBD Kabupaten	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	Dinas Pendidikan
					60. Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup	Jumlah WB yang mendapatkan pelatihan kecakapan hidup	40 Orang	100.000.000	APBD Kabupaten	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	Dinas Pendidikan
					61. Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan
					XIV. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% Guru SD/SMP berkecakapan atau telah berkualifikasi S1/D4	91.6 %	536.500.000		0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	Dinas Pendidikan
					62. Pelaksanaan pembinaan sertifikasi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pembinaan sertifikasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	72.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	Dinas Pendidikan

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja SKPD Penan g-gungjawab
							Tahun 2017			Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		target	Rp *)	
							target	Rp *)	Sumber Dana	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	target	Rp *)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					63. Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Guru yang mengikuti uji kompetensi	250 Orang	145.000.000	APBD Kabupaten	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Pendidikan
					64. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi	Jumlah Guru yang mengikuti kegiatan	231 Orang	118.000.000	APBD Kabupaten	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	Dinas Pendidikan
					65. Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	160.000.000	APBD Kabupaten	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	Dinas Pendidikan
					66. Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Lembaga yang melaksanakan kegiatan pendataan	150 Lembaga	41.500.000	APBD Kabupaten	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	Dinas Pendidikan

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

6.1. Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam setiap organisasi perlu adanya arah yang jelas, arah dimaksud dalam organisasi adalah organisasi menerapkan pola penetapan indikator kinerja melalui pernyataan Visi, pernyataan Misi, Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, kebijakan, program dan kegiatan. Untuk dapat menghasilkan kinerja, maka pada tahap paling awal kita perlu memilih dan menetapkan indikator kinerja yang akan dibutuhkan. Adapun definisi indikator kinerja itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BPKP (2000) adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. indikator kinerja tidak hanya ditetapkan pada level kegiatan namun juga pada level sasaran strategis, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan maupun sasaran agar dapat diukur secara langsung.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka peran pendidikan dalam pembangunan sangatlah penting, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja. Rumusan indikator kinerja yang digunakan pada sektor pendidikan dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: *pertama* Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; *Kedua* Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Pada tabel bawah ini adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>						
1	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;	100	-	100	100	100	100
2	% SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa	60	-	91	93	96	96
3	% SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	54	-	61	70	79	79
4	% SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa	87	-	87	90	93	93
5	% SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel	62	-	66	74	82	82
6	% SMP yang memiliki ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk 36 peserta didik	24	-	28	39	50	50
7	% SMP yang memiliki satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik	2	-	10	20	30	30
8	% SD yang memiliki ruang guru lengkap dengan meja + kursi untuk setiap orang	38	-	40	50	60	60
9	% SMP yang memiliki ruang guru lengkap dengan meja + kursi untuk setiap orang	33	-	40	50	60	60
10	% SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi	73	-	70	74	78	78
11	% SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik	95	-	98	100	100	100
12	% SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran [atau untuk daerah khusus 1 (satu) guru untuk setiap rumpun mata pelajaran]	16	-	25	35	45	45

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Kondisi Awal RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	% SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4	99	-	100	100	100	100
14	% SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	96	-	98	100	100	100
15	% SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 $\geq$ 70%	89	-	92	95	97	97
16	% guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik $\geq$ 35%	69	-	75	80	85	85
17	% SMP/MTs yang memiliki guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik, masing-masing 1 (satu) orang untuk mapel Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan PKn	23	-	30	40	50	50
18	% Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	93	-	95	98	100	100
19	% Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik	72	-	75	80	85	85
20	% Pengawas sekolah/ madrasah yang berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah bersertifikat pendidik	100	-	100	100	100	100
21	Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	100	-	100	100	100	100
22	% SD yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq$ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	6	-	50	75	85	85
23	% SMP yang mendapat kunjungan oleh pengawas satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan selama $\geq$ 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	16	-	50	65	80	80
24	% set buku teks mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn) yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	55	-	65	75	85	85
25	% SD yang telah memenuhi rasio buku teks 1 : 1	8	-	30	50	70	70

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Kondisi Awal RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	% set buku teks mata pelajaran di SMP yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah yang disediakan oleh sekolah	61	-	70	75	85	85
27	% SMP yang telah memenuhi rasio buku teks 1 : 1	9	-	30	60	75	75
28	% SD yang memiliki set peraga dan bahan IPA secara lengkap	12	-	35	45	55	55
29	% SD yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	13	-	40	50	60	60
30	% SMP yang telah memenuhi jumlah buku pengayaan dan referensi	32	-	50	60	70	70
31	% Guru tetap yang rata-rata jam kerja per minggu 37.5 jam	76	-	90	100		
32	% SD yang guru tetap rata-rata jam Kerja per minggunya 37,5 jam	51	-	90	100		
33	% SMP yang guru tetap rata-rata jam Kerja per minggunya 37,5 jam	22	-	90	100		
34	% rombongan belajar yang memenuhi standar	84	-	100	100	100	100
35	% SD yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas I s/d kelas VI	63	-	100	100	100	100
36	% SMP yang menyelenggarakan proses pembelajaran di sekolah selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran kelas VII s/d IX selama 27 jam per minggu	59	-	100	100	100	100
37	% SD yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	-	100	100	100	100
38	% SMP yang menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	-	100	100	100	100
39	% guru yang menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya	95	-	100	100	100	100
40	% SD yang gurunya menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya	75	-	85	100	100	100
41	% SMP yang gurunya menerapkan RPP berdasarkan silabus untuk mata pelajaran yang diampunya	79	-	85	100	100	100

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Kondisi Awal RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	% guru yang mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	96	-	100	100	100	100
43	% SD yang gurunya mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	83	-	100	100	100	100
44	% SMP yang gurunya mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	85	-	100	100	100	100
45	% SD yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	71	-	85	100	100	100
46	% SMP yang kepala sekolahnya melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	75	-	85	100	100	100
47	% guru yang menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester	100	-	100	100	100	100
48	% SD yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester	100	-	100	100	100	100
49	% SMP yang gurunya menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester	100	-	100	100	100	100
50	% satuan pendidikan yang menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik	32	-	100	100	100	100
51	Jumlah SD yang menyampaikan rekapitulasi hasil tes tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota/Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester	48	-	100	100	100	100
52	% satuan pendidikan yang memiliki rencana kerja tahunan	100	-	100	100	100	100

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Kondisi Awal RPJMD ( 2017 )	Target Indikator Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	% satuan pendidikan yang memiliki laporan tahunan	52	-	85	100	100	100
54	% satuan pendidikan yang memiliki komite sekolah yang berfungsi baik	47	-	80	100	100	100
<b>B INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>							
1	Indeks Pendidikan	0,58	-	0,59	0,6	0,61	0,61
2	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD, SMP di Kabupaten Malang	11	-	18	21	27	27



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, direspon dengan adanya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan tetap memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Meskipun ada perubahan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perubahan tersebut tetap berpedoman pada penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang juga harus dijadikan sebagai momentum perbaikan kualitas program dan kegiatan dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Malang, termasuk jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa. Adapun untuk peningkatan kualitas pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa bersifat sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga pencapaian program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai target. Oleh karena itu, secara simultan dan komprehensif diharapkan perubahan yang ada bukan sekedar dokumen secara administratif saja, tapi secara substansial merupakan upaya pelaksanaan pembangunan pendidikan menuju ke arah yang paripurna.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**

**SANUSI**